

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini disusun berdasarkan dua tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Kesimpulan ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan validasi faktur pajak masukan serta faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian validasi faktur pajak masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN di Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI.

5.1.1 Kesimpulan Keterlambatan Validasi Faktur Pajak Masukan

Tujuan penelitian pertama adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan validasi faktur pajak masukan pada pelaporan SPT Masa PPN di Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan data dalam proses validasi faktur pajak masukan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama berikut:

1. Keterlambatan penyerahan dokumen faktur pajak masukan dan dokumen pendukung dari rekanan, sehingga proses validasi tidak dapat dilakukan tepat waktu dan sering menumpuk pada periode mendekati tenggat pelaporan SPT Masa PPN.
2. Proses koordinasi dan alur serah terima dokumen antarunit kerja yang belum berjalan secara teratur dan belum terstandarisasi, sehingga

dokumen sering terlambat diterima oleh bagian yang melakukan validasi, meskipun transaksi telah selesai dilakukan.

3. Belum tersedianya SOP rinci terkait tahapan validasi dan batas waktu pada setiap proses, serta belum adanya mekanisme pemantauan progres yang sistematis, sehingga pengendalian atas potensi keterlambatan cenderung bersifat reaktif dan berulang pada periode pelaporan tertentu.

5.1.2 Kesimpulan Ketidaksesuaian Validasi Faktur Pajak Masukan

Tujuan penelitian kedua adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian validasi faktur pajak masukan dalam proses pelaporan SPT Masa PPN di Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian validasi faktur pajak masukan terjadi karena beberapa faktor utama berikut:

1. Kesalahan pengisian data oleh rekanan sebagai penerbit faktur pajak, seperti kesalahan NPWP, masa pajak, serta ketidaktepatan identitas transaksi, yang menyebabkan faktur tidak lolos validasi sistem dan memerlukan perbaikan atau penerbitan ulang.
2. Pemeriksaan awal atas unsur formal faktur pajak masukan di internal administrasi keuangan belum dilakukan secara konsisten dan rinci, sehingga ketidaksesuaian baru diketahui pada tahap validasi sistem, yang berakibat pada terhambatnya proses pelaporan SPT Masa PPN.
3. Tidak adanya pedoman teknis atau daftar periksa pemeriksaan unsur formal faktur pajak yang digunakan secara seragam, sehingga proses

pemeriksaan cenderung berbeda-beda antarpetugas dan meningkatkan risiko terjadinya ketidaksesuaian data pada saat validasi.

Secara Keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan dan ketidaksesuaian validasi faktur pajak masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN di Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI dipengaruhi oleh faktor internal terkait koordinasi dan pemeriksaan, faktor eksternal dari rekanan, serta faktor sistematis berupa ketiadaan SOP dan mekanisme kontrol yang terukur.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan pengalaman peneliti selama proses penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang memengaruhi pelaksanaan dan hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat terbatas karena sebagian informasi terkait proses validasi Faktur Pajak Masukan merupakan data internal instansi. Oleh karena itu, pihak organisasi dan narasumber membatasi akses terhadap dokumen pendukung, sehingga sebagian dokumen hanya dapat ditinjau secara langsung, namun tidak dapat diminta atau diperoleh salinannya secara menyeluruh.
2. Peneliti menghadapi kesulitan dalam memperoleh data pendukung dari pihak rekanan, khususnya terkait ketepatan penerbitan dan perbaikan e-Faktur, karena keterbatasan komunikasi.

5.3 Saran

Adanya sejumlah keterbatasan dan kekurangan dalam hasil penelitian ini, untuk meningkatkan efektivitas pelaporan SPT Masa PPN dan meminimalkan keterlambatan serta ketidaksesuaian validasi faktur pajak masukan di Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI, penulis menyampaikan beberapa saran atau rekomendasi yang terbagi menjadi dua, yaitu secara jangka pendek dan jangka panjang yang disajikan sebagai berikut:

Jangka Pendek:

1. Melakukan penerbitan faktur pembetulan atas faktur pajak masukan yang mengandung ketidaksesuaian data agar dapat memenuhi ketentuan formal dan material perpajakan.
2. Melaksanakan perbaikan terhadap kesalahan data faktur pajak masukan yang teridentifikasi dalam sistem, sehingga proses validasi dapat berjalan dengan lebih akurat dan tidak menghambat pelaporan SPT Masa PPN.

Jangka Panjang:

1. Menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur yang jelas dan terperinci terkait proses penerimaan, pemeriksaan, unggah, dan validasi faktur pajak masukan. SOP tersebut perlu menetapkan alur kerja, batas waktu setiap tahapan, serta pembagian tanggung jawab antarunit agar proses validasi dapat dilakukan secara tepat waktu dan konsisten.

2. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antarunit yang terlibat dalam proses administrasi perpajakan, khususnya unit pengadaan, keuangan, dan perpajakan. Koordinasi rutin dan mekanisme pelaporan internal yang terjadwal dapat membantu mengurangi keterlambatan akibat proses administrasi berlapis serta memastikan kelengkapan dan kesesuaian data faktur pajak.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan terkait penggunaan sistem e-Faktur dalam Coretax. Pelatihan ini diperlukan untuk mengurangi kesalahan input data, meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan formal faktur pajak, serta mendukung kepatuhan administrasi perpajakan di Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI.
4. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek kajian dengan melibatkan lebih dari satu instansi pemerintah agar hasil penelitian memiliki daya banding dan tingkat generalisasi yang lebih baik. Penelitian juga dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor penyebab dan dampak keterlambatan validasi faktur pajak.